



REPRESENTASI KEBENARAN (*VERUM*) DALAM DUNIA POLITIK DI INDONESIA

(Usaha untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam Terang Immanuel Kant)

Septian¹, Armada Riyanto², Mathias Jebaru Adon³.
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
Septianmsds@gmail.com

Abstract

*The author in this paper tries to examine the representation of truth (*verum*) in the world of politics in Indonesia as an effort to create social justice, by referring to the thoughts of Immanuel Kant. Kant argued that truth is an essential moral foundation in the formation of a just and civilized society. In the midst of Indonesia's political dynamics, this study identifies various aspects of truth representation in the context of public policy, governance, and citizen participation. An in-depth analysis of Kant's concept of truth reveals that efforts to create social justice in Indonesia depend on a shared understanding of moral values and ethical obligations. Along with that, the research highlights the challenges and obstacles that arise in everyday political practice, including corruption, inequality, and social injustice. The results show the need for reforms in political practice and governance to realize Kant's vision of a just society. This involves changes in political mindsets, the eradication of corruption, and increased active participation of citizens in policy-making. This research makes an important contribution in designing concrete steps to achieve social justice in Indonesia by integrating Kant's thoughts on truth and moral obligation into everyday political practice.*

Keywords: *Truth Representation, Social Justice, Immanuel Kant, Political Dynamics.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, dengan demikian, Indonesia juga memiliki dinamika politik yang sangat kompleks. Politik merupakan panggung utama di mana berbagai kepentingan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, terdapat banyak upaya dan komitmen untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Namun, tantangan yang tak terhindarkan selalu menghampiri upaya tersebut. Persoalan yang sering muncul adalah bagaimana cara dapat mencapai keadilan sosial dalam konteks

politik Indonesia yang seringkali penuh dengan persaingan dan konflik. Dalam usaha untuk menjawab persoalan ini, kajian ini akan menjelajahi peran representasi kebenaran (*verum*) dalam politik Indonesia dan bagaimana konsep tersebut dapat menjadi sarana untuk dapat menciptakan keadilan sosial dalam terang pemikiran Immanuel Kant.

Sejak kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945, rakyat Indonesia telah memandang keadilan sosial sebagai salah satu pilar utama dalam konstruksi negara. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan tekad untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum." Namun, realitas politik yang terjadi di masyarakat seringkali jauh dari visi mulia ini. Dunia politik Indonesia sering dihadapi dengan isu-isu korupsi, ketidaksetaraan, dan konflik kepentingan. Menurut Immanuel Kant, ego pribadi semacam itu adalah realitas yang harus diterima oleh akal budi praktis. Sebagai negara yang memiliki aneka ragam kebudayaan, agama, dan etnisitas, mencapai kesetaraan dan keadilan sosial adalah tugas yang rumit. Maka untuk mengatasinya, konsep tentang kebenaran adalah salah satu solusinya

Pernyataan masalah utama dalam esai ini adalah tentang bagaimana representasi kebenaran dalam dunia politik di Indonesia dapat diartikulasikan sebagai sebuah usaha untuk mencapai keadilan sosial dan bagaimana pemikiran Immanuel Kant, seorang filsuf besar dari Abad Pencerahan, dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara kebenaran dan keadilan sosial dalam konteks politik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran representasi kebenaran dalam politik Indonesia dan bagaimana konsep ini dapat dihubungkan dengan upaya menciptakan keadilan sosial. Selain itu, kita akan mengeksplorasi pemikiran Immanuel Kant tentang moralitas dan kewajiban, dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks politik Indonesia. Dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan analisis konseptual yang melibatkan studi literatur, terutama karya-karya Immanuel Kant dan karya-karya tentang politik Indonesia. Penulis juga akan melibatkan data dan contoh kasus nyata dalam politik Indonesia untuk mendukung argumennya. Kajian ini akan mengikuti struktur berikut. Bagian pertama akan menggali konsep kebenaran (*verum*) dan peran Kant dalam memahaminya. Bagian kedua akan membahas konsep keadilan sosial dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Bagian ketiga akan menghubungkan representasi kebenaran dengan upaya menciptakan keadilan sosial dalam politik Indonesia.

KEBENARAN (*VERUM*) DALAM POLITIK

Konsep Kebenaran

Konsep kebenaran (*verum*) merupakan sebuah topik filosofis yang telah mendapatkan perhatian jangka panjang dalam sejarah pemikiran manusia. Masalah kebenaran adalah hal yang sangat dasariah, karena berkaitan dengan segala pengetahuan yang menuju kepada kebenaran. Masalahnya ialah hubungan antara pengetahuan dan kenyataan. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang maksudnya sesuai dengan realita atau kenyataan.¹ Definisi yang menjelaskan tentang kebenaran dan pemahaman filosofis tentang kebenaran, jika diterapkan dalam politik akan membentuk landasan yang penting untuk memahami bagaimana

¹ Adelbert Snijders, *Manusia Kebenaran* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 3.

gagasan ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan di dunia politik. Dalam pemikiran filosofis, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara pernyataan atau gagasan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Ini mengacu pada ketepatan atau keabsahan dari suatu pernyataan atau keyakinan. Kebenaran merupakan konsep yang kompleks, karena melibatkan beragam perspektif tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dalam filsafat, terdapat beberapa teori tentang kebenaran, termasuk teori korespondensi, kohesivitas, pragmatisme, dan konsensus. Teori korespondensi, yang sering kali dianggap sebagai pendekatan klasik, mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar jika pernyataan itu sesuai dengan fakta. Teori kohesivitas lebih menekankan pada konsistensi internal dalam sistem keyakinan. Sementara itu, teori pragmatisme menekankan bahwa kebenaran harus berguna atau bermanfaat dalam konteks praktis. Teori konsensus mengatakan bahwa kebenaran adalah hasil dari kesepakatan bersama dalam komunitas tertentu.²

Relevansi konsep kebenaran dalam politik sangat signifikan. Keputusan politik sering kali didasarkan pada informasi, pernyataan, dan argumen yang diajukan oleh para pemimpin dan pengambil keputusan. Dalam demokrasi, warga negara harus mendasarkan suara mereka pada penilaian tentang apa yang mereka anggap benar. Politik sering kali melibatkan persaingan gagasan dan keyakinan yang berbeda, dan cara konsep kebenaran dipahami dapat memengaruhi tindakan politik. Contoh nyata relevansi konsep kebenaran dalam politik adalah debat tentang informasi yang disampaikan oleh pemimpin politik, kebijakan publik yang didasarkan pada klaim-klaim kebenaran, dan bagaimana masyarakat menilai kepercayaan politik. Reputasi dan kepercayaan publik dalam dunia politik sering kali bergantung pada kejujuran dan ketepatan informasi yang disampaikan oleh pemimpin politik. Ketika pemimpin politik tidak dianggap jujur atau transparan, ini dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat dan merongrong dasar demokrasi. Di tengah sengkabut iklim politik yang tidak berlandaskan pada kebenaran faktual, kondisi masyarakat diperparah dengan minimnya (untuk tidak mengatakan tidak ada) basis epistemologis dalam masyarakat untuk memperoleh kebenaran. Masyarakat tidak bisa memberikan garis demarkasi yang jelas antara kebenaran dan bukan karena terbiasa menerima kebenaran sebagai sebuah produk jadi. Di sinilah kemudian letak tugas penting filsafat untuk mengembalikan nalar kritis dan rasional masyarakat.³ Selain itu, untuk dapat memahami konsep-konsep tentang kebenaran dan aplikasinya dalam dunia politik, masyarakat perlu memahami sumber-sumber filosofis dan politik yang sesuai dengan kondisi perpolitikan saat ini.

Kant dan Kebenaran

Immanuel Kant memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap pemahaman tentang kebenaran dan hubungannya dengan politik. Pemikiran Kant terkenal dengan konsepnya tentang "kewajiban moral" dan "kewajiban etis," yang secara langsung berdampak pada cara kita memahami kebenaran dan bagaimana hal itu berkaitan dengan politik.⁴ Kant memandang kebenaran sebagai sesuatu yang muncul dari kewajiban moral individu. Bagi Kant, individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan "imperatif kategoris", yang merupakan aturan moral universal yang berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Dalam

² Abdul Aziz Faradi, "Teori-Teori Kebenaran dalam Filsafat: Urgensi dan Signifikansinya dalam Upaya Pemberantasan Hoaks", dalam Jurnal Ilmu–Ilmu Ushuluddin, Volume 07, Nomor 01, Juli 2019.

³ *Ibid.*

⁴ Immanuel Kant, *Dasar-Dasar Metafisika Moral*, terj. Robby Habiba Abror (Yogyakarta: Insight Reference, 2022), 18.

pandangan Kant, kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat dinegosiasikan atau dikorbankan demi tujuan politik atau tujuan lainnya. Kebenaran merupakan prinsip moral yang harus dijunjung tinggi, bahkan jika itu melibatkan pengorbanan pribadi.

Kebenaran dapat tercipta dalam berbagai bentuk, tergantung pada perspektif yang digunakan. Kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda dengan kebenaran dalam perspektif penganut empirisme.⁵ Hubungan antara pemikiran Kant tentang kebenaran dan politik adalah bahwa politik juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip etis yang kuat. Kant mendukung gagasan bahwa pemerintah dan pembuat kebijakan harus bertindak sesuai dengan kewajiban etis yang sama, dengan berpegang teguh pada kebenaran dan moralitas. Tindakan politik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral tidak dapat dibenarkan, walaupun tujuannya untuk memperoleh hasil yang dianggap positif. Pemikiran Kant ini berdampak pada gagasan tentang "negara hukum" di mana pemerintah harus beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip moral yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hal ini menciptakan dasar bagi konsep negara untuk menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran. Kant juga menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam politik, karena dapat membantu terwujudnya prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan politik.⁶

Dalam pemikiran politik Kant, usaha untuk menciptakan keadilan sosial harus didasarkan pada kebenaran dan moralitas.⁷ Mewujudkan keadilan sosial adalah kewajiban moral dan etis yang harus dilakukan oleh elemen masyarakat dan pemerintah. Kant mengingatkan bahwa kebenaran bukanlah variable yang dapat disesuaikan untuk kepentingan politik, tetapi merupakan landasan yang harus ditegakkan dalam dunia politik. Pemahaman Kant tentang kebenaran dan politik telah memberikan landasan filosofis yang penting bagi perkembangan teori etika dan politik dan bagi konsep negara hukum. Hal ini mempertegas betapa pentingnya menghormati nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan politik, serta memastikan bahwa kebenaran tetap menjadi prioritas dalam usaha menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

Kebenaran dalam Politik Indonesia

Kebenaran dalam dunia politik di Indonesia merupakan sebuah isu yang kompleks dan kerap kali menjadi topik perdebatan yang hangat. Dalam konteks politik Indonesia, kebenaran mencakup berbagai aspek, termasuk integritas, transparansi, dan etika dalam pengambilan keputusan. Kebenaran dalam politik Indonesia melibatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas para pejabat pemerintah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak politis, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas publik dan pelaksanaan kekuasaan politik.⁸ Prosedur yang adil dapat terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang adil atas hak dan kewajiban. Semua pihak yang terlibat dalam proses musyawarah, untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya "posisi asli" (*the original*

⁵ M.Syaiful Padli1 dan M. Lutfi Mustofa, "*Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Serta Aktualisasinya dalam Menyaring Berita*", dalam Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4, Nomor 1, 2021, 80.

⁶ Takdir Yakindo, dkk, "*Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant*", dalam Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Volume 1, Nomor 1, Januari 2023, 8.

⁷ Althien J. Pesurnay, "*Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia*", dalam Jurnal Filsafat, Volume 31, Nomor 2, Agustus 2021, 206.

⁸ Yosef Keladu Korten, *Partisipasi Politik* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2010), 171.

position).⁹ Kritik dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga ombudsma, juga merupakan bagian integral dalam menjaga kebenaran berpolitik. Mereka memiliki peran penting dalam mengungkapkan ketidakbenaran atau ketidakpatutan dalam tindakan dan kebijakan politik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki kekuasaan absolut, yaitu berperan sebagai pengendali atau pengontrol masyarakat, terutama menyangkut segala kecenderungan-kecenderungan manusiawi. Tujuan dari negara ialah mewujudkan hidup yang damai dan aman dalam masyarakat.¹⁰ Kebenaran dalam politik harus selalu mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan bersama (*Bonum Commune*). Keputusan dan realisasi kebijakan politik harus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.¹¹ Apabila kepentingan pribadi atau kelompok yang mendominasi kebijakan pemerintah, maka hal ini kerap kali dianggap sebagai pelanggaran prinsip kebenaran politik dan prinsip keadilan sosial.

Politisi dan para pemimpin negara dituntut untuk selalu berkomitmen pada janji mereka, yaitu bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang mereka ambil harus selalu bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Pemilih mempercayai representatif yang mereka pilih untuk melaksanakan janji-janji kampanye dan memajukan kepentingan rakyat. Pemenuhan janji ini adalah bentuk konkrit dari pelaksanaan konsep kebenaran dalam politik. Integritas merupakan elemen penting dalam konsep kebenaran berpolitik. Salah satu contoh kebijakan yang benar adalah kebijakan yang tidak terpengaruh oleh korupsi dan praktik-praktik curang lainnya. Dibutuhkan sosok pemimpin negara dan pemerintah yang bersih, tegas, dan berani dalam mengambil keputusan untuk memberantas korupsi sebagai upaya untuk menjaga kebenaran dalam politik.¹²

Dalam konteks Indonesia yang multietnis dan multikultural, kebenaran politik juga berarti menjaga perdamaian dan kesatuan bangsa. Kebijakan yang mendukung kerukunan antar-etnis dan berkontribusi pada kesatuan bangsa dianggap sebagai kebenaran politik. Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu terkait dengan kebenaran dalam politik Indonesia telah menjadi topik hangat dalam perdebatan publik. Transparansi dalam proyek-proyek infrastruktur, integritas pemilihan umum, upaya anti-korupsi, dan ketulusan pemimpin politik adalah beberapa contoh isu yang memunculkan pertanyaan tentang konsep kebenaran dalam politik Indonesia. Mengingat peran politik yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemahaman yang kuat tentang konsep kebenaran dalam politik sangat penting. Hal ini melibatkan tanggung jawab bersama pemerintah, politisi, dan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan keadilan dalam proses politik Indonesia. Keseluruhan, menjaga kebenaran dalam politik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

⁹ Iqbal Hasanuddin, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, dalam Jurnal Refleksi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, 196.

¹⁰ Simon Untaru dan Datu Hendrawan, *Bonum Commune dalam Filsafat Barat* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 124.

¹¹ Aristoteles, *Politik* (Jakarta: Visimedia, 2007), 67.

¹² Reza A. A. Wattimena, *Filsafat Anti Korupsi* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 14.

KEADILAN SOSIAL

Konsep Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan salah satu cita-cita bangsa dan negara yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam sila kelima. Keadilan sosial merupakan prinsip yang menekankan upaya untuk mencapai distribusi yang adil dan merata dari sumber daya, peluang, dan manfaat bagi masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai ketidaksetaraan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik, serta memastikan bahwa hak-hak dasar semua individu dihormati dan terpenuhi. Rasionalitas komunikatif dalam konteks masyarakat demokratis sangat diperlukan untuk mempertemukan, menyatukan, serta menyingkapkan kebenaran dengan rasa keadilan. Tugas pemerintah adalah memperkuat penegakkan hukum dan menciptakan peradilan yang bersih supaya rasa keadilan dan *bonum commune* dirasakan di tengah kehidupan bersama. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat menentukan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara.¹³

Keadilan sosial menciptakan landasan yang lebih inklusif bagi masyarakat, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi dalam proses sosial dan politik, dan merasakan manfaat dari pembangunan.¹⁴ Dengan memprioritaskan keadilan sosial, masyarakat berupaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta memperjuangkan hak-hak minoritas dan kelompok-kelompok rentan. Prinsip ini juga memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial, karena ketidaksetaraan yang kerap kali terjadi dapat mengancam stabilitas masyarakat. Dalam praktiknya, ini mencakup kebijakan Pendidikan yang inklusif, sistem

Dalam praktiknya, ini mencakup kebijakan pendidikan yang inklusif, sistem perawatan kesehatan yang merata, akses yang setara ke peluang ekonomi, dan perlindungan hukum yang adil bagi semua warga. Keseluruhan, keadilan sosial adalah landasan moral dan etis bagi masyarakat yang adil dan inklusif di mana hak-hak dan kepentingan semua individu diakui dan dihormati, dan ini memiliki relevansi mendalam dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas sosial.

Kant dan Keadilan Sosial

Kant dikenal dengan etika deontologisnya, yang menekankan pentingnya kewajiban moral dan prinsip-prinsip etis sebagai landasan bagi tindakan manusia. Pandangan Kant tentang keadilan sosial menciptakan landasan moral yang penting untuk memahami bagaimana ia melihat peran prinsip moral dalam politik. Kant berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang diperlakukan sebagai kewajiban moral, tanpa memperhatikan konsekuensi atau keuntungan pribadi. Prinsip moral yang paling terkenal dalam pemikirannya adalah "imperatif kategoris," yang merupakan aturan moral universal yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dalam konteks keadilan sosial, Kant menegaskan bahwa kewajiban moral harus menjadi dasar bagi tindakan dan kebijakan politik. Artinya, politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersifat universal.

¹³ Martin C. Barut, dkk, "Merajut Kembali Relasionallitas Masyarakat dan Pemerintah Relevansi Politik Berasaskan Rekonsiliasi dan Kebenaran", dalam Jurnal Focus, Volume 2, Nonor 1, 2021, 47-48.

¹⁴ Iqbal Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls", Loc. Cit. 201.

Kant juga menekankan pentingnya hukum dan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip moral. Ia menyatakan bahwa pemerintahan harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etis, dan hukum harus diterapkan dengan adil dan setara kepada semua warga. Dalam hal ini, keadilan sosial menjadi bagian integral dari tata kelola dan pembangunan negara yang baik. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses kegiatan berencana dan terarah yang dilakukan oleh suatu bangsa atau masyarakat, guna mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati. Tujuan bersama ini dianggap sebagai kerangka ideal yang akan digunakan sebagai referensi oleh masyarakat dalam proses berkegiatan dalam pembangunan.¹⁵ Prinsip-prinsip moral harus diterapkan dalam setiap kebijakan dan tindakan politik untuk memastikan hak-hak dasar dan kesejahteraan individu dihormati dan dijamin. Ini mencakup upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, memastikan akses yang setara ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta melindungi hak-hak minoritas. Konsep Kant tentang hubungan antara etika, keadilan sosial, dan politik memberikan pemahaman yang berharga tentang pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dalam pembuatan kebijakan dan tindakan politik untuk menciptakan keadilan sosial dan Pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Keadilan Sosial di Indonesia

Keadilan sosial adalah prinsip dasar yang tertanam dalam Pancasila, dasar negara Indonesia, dan merupakan keutamaan politik (*par excellence*) dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.¹⁶ Perkembangan konsep keadilan sosial dalam politik dan masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945. Pada awal kemerdekaan Indonesia, fokus utama adalah pada pembentukan dasar-dasar politik dan ekonomi yang mandiri, yang mengakibatkan perjuangan keras untuk menghapuskan penjajahan asing. Konsep keadilan sosial, meskipun sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, mungkin belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya pada masa itu. Namun, dengan berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya keadilan sosial semakin tumbuh dalam politik dan masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya, keadilan sosial merupakan suatu moralitas politik yang memberi perhatian pada distribusi hak serta kewajiban secara adil demi terciptanya suatu relasi yang saling menguntungkan di antara segenap masyarakat.¹⁷ Salah satu tonggak penting dalam perkembangan keadilan sosial di Indonesia adalah perubahan Konstitusi pada tahun 1945, dengan penambahan sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan kondisi yang lebih adil bagi semua warga. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia menjadi sorotan utama dalam reformasi politik dan konstitusi. Pemberantasan korupsi dan peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan menjadi prioritas.¹⁸ Indonesia juga mengalami perkembangan dalam hal inklusi sosial dan perlindungan hak-hak minoritas. Dalam konteks ekonomi, berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi ketidaksetaraan, termasuk program bantuan

¹⁵ Peni Jati Setyowati, "Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum dalam Perkembangan Politik di Indonesia", dalam Jurnal Yuridika, Volume 31, Nomor 1, Januari 2016, 99.

¹⁶ Simplesius Sandur, *Analisis Pandangan Politik Thomas Aquinas* (2020), 37.

¹⁷ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 95.

¹⁸ Wenda Hartanto, "Kesadaran Hukum sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat", dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, 476.

sosial bagi keluarga miskin, serta upaya untuk memajukan sektor usaha kecil dan menengah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Perkembangan keadilan sosial di Indonesia juga tercermin dalam kerangka hukum yang semakin memadai.¹⁹ Terdapat peraturan hukum yang mendukung hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menegaskan komitmen untuk mengawasi pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan korupsi. Dalam keseluruhan, perkembangan konsep keadilan sosial dalam politik dan masyarakat Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, komitmen untuk mencapai keadilan sosial tetap menjadi landasan yang kuat dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

REPRESENTASI KEBENARAN DALAM POLITIK INDONESIA

Politik Indonesia dan Representasi Kebenaran

Politik Indonesia telah melibatkan berbagai isu dan konsep yang berkaitan dengan representasi kebenaran selama sejarahnya yang beragam. Kebenaran dalam politik mengacu pada kejujuran, integritas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip dasar merupakan topik hangat dalam rangka menilai suatu negara hukum modern.²⁰ Dalam konteks Indonesia, konsep ini telah menjadi sorotan penting dalam perkembangan politik dan tatanan sosial negara ini. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, kebutuhan akan representasi kebenaran semakin mendesak. Transparansi dalam pemilihan umum, integritas para pemimpin politik, dan akuntabilitas pemerintah telah menjadi perhatian utama. Masyarakat Indonesia semakin menuntut pemimpin dan institusi politik untuk beroperasi dengan kejujuran dan integritas.²¹ Hal ini mencakup kebutuhan untuk mengatasi isu korupsi, yang telah menjadi masalah sistemik dalam politik Indonesia selama beberapa dekade.

Media massa dan jurnalis memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran dalam politik. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan dan kebijakan pemerintah serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.²² Terutama dalam era digital, media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam menyebarkan informasi, sehingga kebenaran dalam politik harus terus dijaga. Selain itu, representasi kebenaran juga terkait dengan pengelolaan konflik politik di Indonesia. Indonesia adalah negara yang multietnis dan multikultural, sehingga penting untuk menjaga perdamaian dan kerukunan antar-etnis.²³ Kebenaran dalam konteks ini mencakup upaya untuk memahami dan menghormati hak-hak serta kepentingan semua kelompok dalam masyarakat. Namun, meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan representasi kebenaran dalam politik Indonesia, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi. Masih terdapat isu korupsi yang merajalela, ketidaksetaraan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Althien J. Pesunay, “Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM Di Indonesia”, dalam *Jurnal Filsafat*, Volume 31, Nomor 2, Agustus 2021, 200.

²¹ S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 50.

²² Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

²³ Nur Achmad, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Kompas, 2001), 13.

ekonomi yang signifikan, dan ketegangan politik yang dapat mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, pemimpin politik dan warga negara Indonesia harus terus bekerja sama untuk memperkuat nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi dalam politik.

Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia

Dalam upaya mencapai keadilan sosial melalui representasi kebenaran, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama adalah isu korupsi yang merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi dapat mengganggu representasi kebenaran dalam politik dengan cara mengorupsi proses pengambilan keputusan, memengaruhi pemilihan umum, dan merusak integritas pemimpin politik.²⁴ Kebenaran dan integritas menjadi terguncang ketika pejabat publik, yang seharusnya menjadi perwakilan masyarakat, terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk penguatan lembaga penegak hukum dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Tantangan lain adalah isu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam banyak masyarakat, terdapat ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya, layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Ketidaksetaraan ini dapat menghambat representasi kebenaran, karena warga dengan akses terbatas ke sumber daya dan peluang akan kesulitan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka dan memengaruhi proses politik.²⁵ Meningkatkan keadilan sosial melalui representasi kebenaran memerlukan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ini melalui kebijakan inklusif dan distribusi yang lebih merata dari manfaat ekonomi.

Selanjutnya, isu polarisasi politik dan konflik dapat menghalangi pencapaian keadilan sosial. Terkadang, perbedaan politik yang tajam dan ketegangan sosial dapat mengaburkan proses representasi kebenaran, karena perpecahan politik dapat mengaburkan fokus pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dialog politik yang konstruktif, pendekatan inklusif dalam pembuatan kebijakan, dan pemahaman bersama tentang nilai-nilai keadilan sosial. Selain itu, dalam era informasi digital, penyebaran berita palsu atau disinformasi dapat mengancam representasi kebenaran dalam politik. Informasi yang salah atau menyesatkan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemilihan umum, mengganggu upaya untuk mencapai keadilan sosial. Meningkatkan literasi media dan pendidikan masyarakat tentang sumber informasi yang dapat dipercaya menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Globalisasi dan isu-isu lintas batas juga dapat mempengaruhi upaya mencapai keadilan sosial melalui representasi kebenaran. Perubahan ekonomi global dan mobilitas yang lebih besar dapat memberikan dampak yang kompleks pada masyarakat, dan ini memerlukan respon politik yang berorientasi pada keadilan sosial yang mencakup semua kelompok dalam masyarakat. Dalam menghadapi hambatan dan tantangan ini, perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Penguatan institusi, peningkatan transparansi, dan pengembangan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kebenaran dan keadilan sosial menjadi kunci dalam usaha untuk mencapai representasi kebenaran yang efektif dalam politik dan masyarakat.

²⁴ Reza A. A. Wattimena, *Filsafat Anti Korupsi*, *Loc. Cit.* 38.

²⁵ Iqbal Hasanuddin, *"Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls"*, *Loc. Cit.* 212.

Solusi dan Usaha untuk Menciptakan Keadilan Sosial

Pemikiran Immanuel Kant memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya mencapai keadilan sosial dalam politik Indonesia. Etika deontologisnya yang menekankan pentingnya kewajiban moral dan prinsip-prinsip etis sebagai dasar tindakan manusia.²⁶ Prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dalam politik Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Salah satu elemen penting dalam pemikiran Kant adalah imperatif kategoris, yang merupakan aturan moral universal yang harus diikuti oleh semua individu tanpa terkecuali.²⁷ Dalam konteks politik Indonesia, penggunaan imperatif kategoris dapat menjadi panduan dalam pembuatan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Kewajiban moral pemimpin politik dan pemerintah adalah untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang bersifat universal, tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Keadilan sosial, dalam pemikiran Kant, mencakup aspek-aspek seperti distribusi sumber daya yang adil, perlindungan hak-hak dasar individu, dan kesetaraan dalam peluang.²⁸ Kant menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial, politik Indonesia dapat merujuk pada prinsip-prinsip Kant yang bersifat universal. Ini berarti bahwa kebijakan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang menghormati martabat manusia dan hak-hak dasarnya. Selanjutnya, Kant juga menekankan pentingnya hukum dan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etis.²⁹ Pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa hukum dan peraturan yang diterapkan adil, setara, dan konsisten untuk semua warga negara. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mencapai keadilan sosial. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi sarana untuk mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etis dalam pemerintahan.

Ketika menerapkan pemikiran Kant dalam politik Indonesia, penting untuk mengatasi isu korupsi. Korupsi adalah hambatan serius dalam upaya mencapai keadilan sosial karena dapat merusak prinsip-prinsip moral yang mendasari representasi kebenaran. Kant akan menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dalam tindakan pemimpin politik dan pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas yang tinggi dalam politik Indonesia. Upaya untuk meningkatkan transparansi, penguatan lembaga penegak hukum, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah adalah langkah-langkah yang sesuai dengan pandangan Kant. Selanjutnya, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi adalah tantangan yang juga dapat diatasi dengan mempertimbangkan pandangan Kant. Prinsip moral Kant akan mendukung upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Hal ini mencakup pembangunan kebijakan inklusif yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan dalam masyarakat. Pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya dan manfaat ekonomi didistribusikan secara lebih merata melalui program-program bantuan sosial dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

²⁶ S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Loc. Cit. 107.

²⁷ Takdir Yakindo, dkk, "Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant", *Op. Cit.*

²⁸ Muhammad R. Nirasma, "Dialami Tanpa Mungkin Diketahui: Sebuah Sanggahan Atas Penafsiran Noumena Immanuel Kant Sebagai Entitas Metafisik", dalam *Jurnal Human Narratives* Volume 1, Nomor 2, Maret 2020, 80.

²⁹ S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Loc. Cit. 112.

Isu polarisasi politik dan konflik juga merupakan tantangan dalam mencapai keadilan sosial. Dalam pemikiran Kant, penting untuk menjaga kesatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Dialog politik yang konstruktif, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman bersama tentang nilai-nilai keadilan sosial dapat membantu mengatasi polarisasi dan konflik dalam politik Indonesia.³⁰ Masyarakat sipil, pemimpin politik, dan warga negara dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan harmonis.³¹ Dalam era informasi digital, penyebaran disinformasi dan berita palsu juga harus diatasi. Pendidikan media dan literasi informasi dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya, sehingga kebenaran dalam politik tidak tercemar oleh informasi yang salah atau menyesatkan. Globalisasi dan isu-isu lintas batas juga harus diintegrasikan dalam pemikiran Kant tentang keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam ekonomi global perlu memastikan bahwa dampak globalisasi tidak mengabaikan kepentingan warga negara.

Dalam menggabungkan pemikiran Kant dalam politik Indonesia untuk mencapai keadilan sosial, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral ke dalam kebijakan dan praktik politik. Ini memerlukan komitmen yang kuat untuk integritas, transparansi, dan kejujuran dalam semua aspek pemerintahan dan kebijakan. Dalam menghadapi hambatan seperti korupsi, ketidaksetaraan, polarisasi, dan disinformasi, pemikiran Kant dapat menjadi panduan moral yang kuat dalam menjalankan politik yang berorientasi pada keadilan sosial dan martabat manusia. Dengan mengutamakan nilai-nilai moral ini, politik Indonesia dapat menjadi sarana untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif, sesuai dengan aspirasi Pancasila sebagai dasar negara.

PENUTUP

Dalam menjalankan analisis mengenai "Representasi Kebenaran (*Verum*) dalam Dunia Politik di Indonesia sebagai Upaya untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam Terang Immanuel Kant," penulis telah menyelidiki bagaimana pemikiran Immanuel Kant dan prinsip-prinsip etisnya dapat diterapkan dalam politik Indonesia untuk mencapai keadilan sosial. Kant, mengembangkan teori etika deontologis yang menekankan kewajiban moral dan prinsip-prinsip moral yang bersifat universal sebagai landasan tindakan manusia. Konsep ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks politik Indonesia yang beragam dan kompleks. Salah satu poin utama dalam analisis ini adalah betapa pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip moral Kant dalam politik dan kebijakan publik. Kant menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dilakukan sebagai kewajiban moral, tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau keuntungan pribadi. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa pemimpin politik dan pemerintah memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang bersifat universal.

Representasi kebenaran dalam politik menjadi sangat penting dalam pemikiran Kant. Kebenaran dalam politik mencakup kejujuran, integritas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, kebenaran menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai keadilan sosial. Pemerintah dan pemimpin politik harus bertindak dengan integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap tindakan mereka. Ketika

³⁰ Martin C. Barut, dkk, "*Merajut Kembali Relasionallitas Masyarakat dan Pemerintah Relevansi Politik Berasaskan Rekonsiliasi dan Kebenaran*", *Loc. Cit.* 50.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1997), 11.

kita menerapkan pandangan Kant dalam politik Indonesia, kita menyadari bahwa ada sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama adalah isu korupsi. Korupsi dapat menggoyahkan prinsip-prinsip moral yang mendasari representasi kebenaran dalam politik. Untuk mengatasi hambatan ini, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Ini mencakup penegakan hukum yang lebih kuat dan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Tantangan lain adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam pemikiran Kant, prinsip-prinsip moral harus diterapkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan distribusi yang lebih merata dari manfaat ekonomi. Pemerintah harus berusaha untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

Pemikiran Immanuel Kant tentang etika dan moral memiliki relevansi yang kuat dalam politik Indonesia yang beragam. Penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral Kant dalam politik dan kebijakan publik untuk mencapai keadilan sosial. Meskipun terdapat hambatan dan tantangan, upaya untuk menerapkan pandangan Kant dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Representasi kebenaran dalam politik adalah kunci dalam upaya ini, dan dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral, politik Indonesia dapat menjadi sarana untuk mencapai visi keadilan sosial yang telah lama diidamkan. Dalam menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, integritas, transparansi, dan kejujuran harus menjadi landasan yang kuat dalam perjalanan menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemikiran Kant memberikan kerangka kerja etis yang berharga bagi politik Indonesia dalam mencapai tujuan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Aristoteles. *Politik*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Barut, Martin C., dkk. “*Merajut Kembali Relasionalitas Masyarakat dan Pemerintah Relevansi Politik Berasaskan Rekonsiliasi dan Kebenaran*”, dalam Jurnal Focus, Volume 2, Nomor 1, 2021. 41-48.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Faradi, Abdul Aziz. “*Teori-Teori Kebenaran dalam Filsafat: Urgensi dan Signifikansinya dalam Upaya Pemberantasan Hoaks*”, dalam Jurnal Ilmu–Ilmu Ushuluddin, Volume 07, Nomor 01, Juli 2019. 97-118.
- Hartanto, Wenda. “*Kesadaran Hukum sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat*”, dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015. 469-483.
- Hasanuddin, Iqbal. “*Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*”, dalam Jurnal Refleksi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018. 193-204.
- Kant, Immanuel. *Dasar-Dasar Metafisika Moral*, terj. Robby Habiba Abror. Yogyakarta: Insight Reference, 2022.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.

- Nirasma, Muhammad R. “*Dialami Tanpa Mungkin Diketahui: Sebuah Sanggahan Atas Penafsiran Noumena Immanuel Kant Sebagai Entitas Metafisik*”, dalam Jurnal Human Narratives Volume 1, Nomor 2, Maret 2020. 76-87.
- Padli1, M.Syaiful dan M. Lutfi Mustofa. “*Keberanian dalam Perspektif Filsafat Serta Aktualisasinya dalam Menyaring Berita*”, dalam Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4, Nomor 1, 2021. 78-88.
- Pesurnay, Althien J. “*Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia*”, dalam Jurnal Filsafat, Volume 31, Nomor 2, Agustus 2021. 192-219.
- Sandur, Simplesius. “*Analisis Pandangan Politik Thomas Aquinas*”. 2020.
- Setyowati, Peni Jati. “*Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum dalam Perkembangan Politik di Indonesia*”, dalam Jurnal Yuridika, Volume 31, Nomor 1, Januari 2016.
- Snijders, Adelbert. *Manusia Kebenaran*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “*Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015. 849-871.
- Tjahjadi, S.P. Lili. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Untaru, Simon dan Datu Hendrawan. *Bonum Commune dalam Filsafat Barat*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Wattimena, Reza A. A. *Filsafat Anti Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Yakindo, Takdir, dkk. “*Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant*”, dalam Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Volume 1, Nomor 1, Januari 2023. 1-25.